

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Pustaka

Wardani (2013) meneliti menggunakan data sekunder dari 35 Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2006 - 2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda data panel dengan metode GLS serta model *Fixed Effect* . Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan Pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan.

Mustika (2011) meneliti menggunakan metode analisis kuantitatif regresi linear berganda dengan memperlakukan jumlah penduduk miskin sebagai variabel terikat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDB dan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

dan kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen (tingkat kemiskinan)

Riva, dkk (2014). meneliti menggunakan data sekunder dengan menggunakan data tahunan jumlah penduduk miskin, UMP dan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau tahun 2002-2011, dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, sedangkan pada variabel upah minimum berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Dalam proses analisis menunjukkan bahwa pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Dores (2014) meneliti menggunakan data sekunder 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Data diolah dengan bantuan Software SPSS dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda, yang digunakan untuk melihat pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin.

Dalam proses analisis dapat disimpulkan bahwa bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil

penelitian angka melek huruf dan kesehatan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk, untuk itu diharapkan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Barat sangat diperlukan peran pemerintah secara aktif yaitu dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat serta mutu pendidikan (angka melek huruf) agar tidak ada lagi masyarakat di Provinsi Sumatra Barat yang tidak bisa baca tulis sehingga akan berdampak pada penurunan kemiskinan

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Kemiskinan

Menurut BPS kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Sedangkan kemiskinan menurut Kuncoro (1997) merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada suatu norma tertentu terutama dalam pengukuran kemiskinan yang berdasarkan atas konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan oleh pola konsumsi didasarkan pada dua elemen diantaranya:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan lain sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.2.1.1 Penyebab kemiskinan

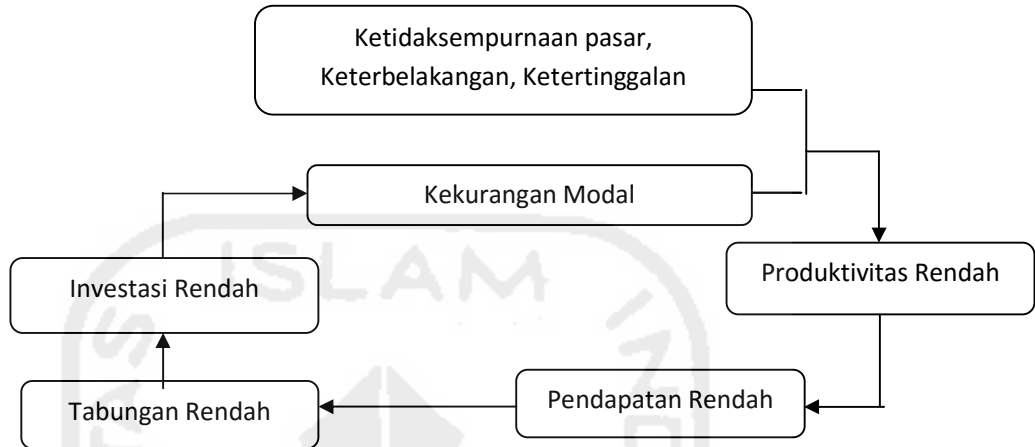
Kuncoro (1997) Adanya kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, adapun sebab-sebabnya :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Dengan kata lain penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah yang pada akhirnya akan mengakibatkan perolehan upah yang rendah. Keadaan rendahnya kualitas sumber daya manusia ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat penduduk miskin, di samping itu ada faktor lainnya yaitu nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan
3. Perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan :

Gambar 2.1

Lingkaran setan Kemiskinan Versi Nurske



Sumber : Mudrajad Kuncoro, 1997

Dilihat dari Gambar 2.1 bahwa apabila kemiskinan terjadi maka akan menyebabkan adanya ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar kondisi ini seperti ditandai dengan adanya ketertinggalan dan keterbelakangan. Jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada produktivitas yang rendah yang nantinya akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Kemudian dari kondisi pendapatan yang rendah maka akan berpengaruh pada tingkat tabungan yang rendah pula, ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah dan tidak mempunyai uang untuk disimpan. Dampak selanjutnya akan menyebabkan angka tingkat investasi rendah sehingga akan kekurangan dalam hal permodalan sehingga akan mengalami kondisi seperti semula.

2.2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Arsyad (2004) mendefinisikan kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, dalam pengukurannya terdapat dua macam cara untuk mengukur kemiskinan yaitu kemiskinan absolute dan ukuran kemiskinan relative :

1. Kemiskinan absolute,

yaitu suatu ukuran yang mengkaitkan kemiskinan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Apabila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum , maka orang dapat dikatakan miskin. Kesulitan utama dalam konsep pengukuran kemiskinan secara absolute adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena keduanya tidak hanya di pengaruhi oleh factor adat istiadat saja melainkan juga diakibatkan oleh iklim,tingkat kemajuan suatu Negara dan berbagai factor ekonomi lainnya.

2. Kemiskinan Relatif

Dalam konsep pengukuran ini, kemiskinan terjadi ketika seseorang mempunyai pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakatsekitarnya. Dengan kata lain kemiskinan relative diukur berdasarkan keadaan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan konsep kemiskinan relatif, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah, sehingga konsep ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolute.

2.2.1.3. Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemiskinan antara lain :

1. Head Count Index (HCI - P0) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
4. Foster-Greer-Thorbecke/FGT (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - Y_i}{z} \right]^\alpha$$

Dimana, $\alpha = 0, 1, 2$, dan z = garis kemiskinan, Y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $Y_i < z$, sedangkan q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan n = Jumlah Penduduk. Jika $\alpha = 0$ maka diperoleh Head Count Index (P0); jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1) dan $\alpha = 2$ adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P2)

2.2.1.4 Kebijakan dalam Mengurangi Kemiskinan

Dalam usaha menurunkan tingkat kemiskinan Arsyad (2004) menyebutkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan pengurangan kemiskinan pedesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk dalam pembangunan irigasi.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas golongan miskin.

Di Indonesia adanya pendidikan sangat berperan penting dalam pengurangan kemiskinan jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Disamping pendidikan perbaikan kesehatan dari pemerintah merupakan suatu alat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor utama yang mendasari kebijakan ini :

- a. Berkurangnya beban penderitaan secara langsung memuaskan kebutuhan konsumsi pokok juga merupakan tujuan kebijaksanaan sosial yang sangat penting.
- b. Perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin karena dengan kondisi kesehatan yang baik akan meningkatkan daya kerja.
- c. Menurunkan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tak langsung juga berperan dalam mengurangi kemiskinan yakni mengurangi tingkat kesuburan, tingkat kematian yang semakin rendah tidak saja membantu para orang tua untuk mencapai jumlah keluarga yang mereka inginkan, tetapi juga membuat mereka menginginkan keluarga yang lebih kecil.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara efektif ketimbang program-program pemerintah. Adanya keterlibatan secara aktif LSM di dalam program-program pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap program-program pemerintah dan oleh karena itu pada

kahirnya akan meningkatkan paangka partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan LSM dapat meringankan biaya finansial dan staf dalam mengimplementasikan program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.

2.2.2 Upah Minimum

2.2.2.1 Teori Upah

Menurut Sumarsono (2003) upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah Minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun Sub sektoral. Teori yang mendasari sistem pengupahan disuatu negara didasarkan pada :

1. Teori upah menurut nilai pertentangan kelas

Dalam teori ini Karl Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sistem pengupahan dan pelaksanaannya berdasarkan pandangan Karl Marx adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang macam dan jumlahnya hampir sama. Nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah tiap-tiap orang kira-kira sama.
- b. Sistem pengupahan tidak memberikan intensif yang sangat perlu untuk menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional
- c. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau bekerja menurut kemampuannya.

Namun dalam kenyataannya sistem pengupahan ini dikatakan hanya terdapat pada masyarakat impian , karena dalam sistem ini banyak faktor-faktor yang tidak diperhitungkan sehingga tidak mungkin sistem ini dijalankan secara murni.

2. Teori upah menurut pertambahan produk marginal

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiapn faktor industri yang dipergunakan menerima atai diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha memperkerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan nilai upah yang diterima orang tersebut. Tngkat upah yang dibayarkan pengusaha adalah sebagai berikut :

$$W = WMPPL = MPPL \times P$$

Dimana W = tingkat upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan, P = harga jual barang dalam rupiah per unit barang, WMPPL = pertambahan

marginal pekerja diukur dalam unit barang per unit waktu, dan MPPL = nilai pertambahan hasil marginal pekerja atau karyawan.

Menurut teori Neo Klasik karyawan memperoleh upah senilai dengan hasil marginalnya. Untuk memaksimalkan keuntungan pengusaha memberikan imbalan kepada setiap faktor produksi sebesar nilai pertambahan hasil marginal masing-masing faktor produksi tersebut.

Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu antara lain :

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja

2.2.2.2 Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Berdasarkan Permenaker No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi KHL dalam Permenaker No.13 Tahun 2012 terdapat lima faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum :

1. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Menurut Kepmenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan dan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terdapat standar KHL yang terdiri dari 7 kelompok dan 60 komponen kebutuhan yaitu :

- a. Makanan dan minuman (11 komponen)
- b. Sandang (13 komponen)

- c. Perumahan (26 komponen)
- d. Pendidikan (2 komponen)
- e. Transportasi (1 komponen)
- f. Rekreasi dan tabungan (2 komponen)

Melalui komponen kebutuhan tersebut kemudian Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten melakukan survey harga yang dilakukan secara berkala untuk menentukan nilai KHL. Apabila kebijakan pemerintah sebatas mempertahankan nilai riil upah minimum, maka persentase kenaikan upah minimum ditetapkan sama dengan persentase kenaikan nilai KHL.

2. Produktivitas Makro

Produktivitas makro suatu Negara atau daerah dicerminkan dari pendapatan perkapita. Kondisi pengupahan yang ideal adalah apabila nilai upah minimum seimbang dengan nilai pendapatan perkapita di suatu daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi suatu Negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong aktivitas ekonomi yang tinggi pula. Jumlah uang beredar yang naik dalam masyarakat karena adanya aktivitas ekonomi akan berdampak pada munculnya inflasi, adanya inflasi dapat mempengaruhi upah riil yang diterima pekerja. Apabila kemampuan daya beli riil yang diperoleh dari upah yang diterima dari upah yang

diterimanya tidak semakin menunjukkan penurunan, maka dari itu penentuan upah minimum mempertimbangkan tingkat inflasi serta faktor-faktornya yang mempengaruhinya.

4. Kondisi Pasar Kerja

Seringkali terjadi kondisi dimana penambahan angkatan kerja baru tidak dapat diserap pasar seluruhnya, hal inilah yang menyebabkan pengangguran bertambah. Tingkat upah yang semakin naik maka terdapat kemungkinan kemampuan pengusaha dalam menyediakan lowongan kerja akan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena tidak semua pengusaha memiliki kemampuan membayar upah yang naik terus, karena kemampuan pengusaha juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya seperti kondisi pasar barang dan pasar uang, oleh karena itu pemerintah dalam menentukan kenaikan upah minimum berusaha keras untuk mempertimbangkan agar keputusannya tidak membatasi lapangan kerja yang ada dan menambah jumlah pengangguran yang cukup tinggi.

5. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal)

Upah merupakan pembayaran pengusaha terhadap pemberi jasa yaitu pekerja. Tidak semua pengusaha memiliki kemampuan tinggi dalam pembayaran upah, sehingga tidak serta merta jika terjadi kenaikan upah minimum sekalipun pengusaha tersebut mampu membayar upah yang telah ditetapkan, usaha pengusaha seperti itulah yang dinamakan usaha marginal tidak mampu. Agar penetapan upah

minimum tidak menjadikan usaha marginal gulung tikar, maka pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum juga mempertimbangkan nasib usaha marginal.

2.2.2.1 Hubungan upah minimum dengan kemiskinan

Upah minimum merupakan suatu imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan (Sumarsono, 2003). Dalam kenyataannya adanya kebijakan upah minimum diberlakukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja. Sehingga dengan adanya kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yanthi dan Marhaeni (2015) menyebutkan bahwa kesejahteraan buruh /pekerja disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan buruh/pekerja sehingga tingkat kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat, Kenaikan upah akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

2.2.3 Tingkat Pengangguran

Sukirno (2011) menyebutkan bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang

menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh.

Di samping itu faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah :

1. Menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik
2. Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan
3. Ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

2.2.3.1 Jenis Pengangguran

Menurut Sumarsono (2003) pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan dalam pasar kerja. Adapun bentuk-bentuk pengangguran sebagai berikut :

1. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran normal atau friksional bukan merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan ini dapat terbentuk karena adanya :

- a. Tenggang waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena factor jarak atau kurangnya informasi.

- b. Kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja.
- c. Pencari kerja tidak mengetahui dimana adanya lowongan pekerjaan dan demikian pula pengusaha tidak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.

2. Pengangguran Musiman.

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Kegiatan ekonomi masyarakat sering kali terpengaruh oleh irama musim. Ada musim giat sehingga banyak permintaan tenaga kerja dan ada masa-masa dimana kegiatan mengendur. Pergantian antara giat dan kendur terjadi secara teratur setiap tahun. Selama kegiatan mengendur terjadi pengangguran yang akan terpecahkan secara otomatis bila tiba masa giat kembali.

- 3. Pengangguran Siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi dikarenakan suatu keadaan dimana pengusaha kehilangan kepercayaan terhadap peluang di masa depan, sehingga sikap pesimisme yang timbul membawa dampak negatif pada kesempatan kerja yang mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran.
- 4. Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Adanya perubahan dalam struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak

pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut.

5. Pengangguran Teknologi

Dalam pertumbuhan industri adanya teknologi yang dipakai dalam proses produksi selalu berubah-ubah. Perubahan teknologi ini membawa dampak kesempatan kerja ke segala arah. Kekuatan substitutif dan kekuatan merombak spesifikasi jabatan yang ditimbulkan membawa dampak negatif bagi kesempatan kerja berupa pengangguran.

6. Pengangguran karena kurangnya permintaan agregat

Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi dapat memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja.

Sedangkan berdasarkan dimensinya Edwards (dikutip dari Arsyad, 2004) membedakan lima bentuk pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka, yaitu mereka yang bekerja secara sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan)
2. Setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan

3. Tampaknya bekerja tetapi tidak secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, yang dimaksudkan disini adalah:
 - a. Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*) misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.
 - b. Pengangguran tersembunyi (*Hidden unemployment*) misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
 - c. Pensiun lebih awal, ini biasanya terjadi pada pegawai pemerintah
 - d. Tenaga kerja yang lemah, yaitu mereka yang mungkin bekerja *Full time*, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit .
 - e. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu bekerja secara produktif, tetapi karena kurangnya sumber daya penolong yang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

2.2.3.2 Dampak Pengangguran

Feriyanto (2014) menyebutkan ada beberapadampakyang ditimbulkan akibat adanya pengangguran antara lain :

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
 - a. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah daripada pendapatan nasional potensial.
 - b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) pemerintah berkurang

- c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi
2. Dampak pengangguran bagi individu atau masyarakat
 - a. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan
 - b. Pengangguran menyebabkan kehilangan ketrampilan
 - c. Pengangguran menyebabkan ketidak stabilan politik
 - d. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya penyakit sosial masyarakat

2.2.3.3 Kebijakan Penanganan Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu masalah yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan adanya pengangguran dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Menurut Sumarsono (2003) masalah pengangguran mempunyai pemecahan yang berbeda-beda tergantung dari bentuk permasalahannya :

1. Pengangguran Friksional, ditinjau dari deskripsi permasalahan maka inti persoalan pengangguran jenis ini terletak pada hambatan aliran informasi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu penanganannya harus berupa usaha untuk mengintensifikasi dan mengekstensifkan informasi. Intensif agar informasi disebarkan dalam jumlah yang cukup. Penyebaran secara ekstensif dimaksudkan agar menjangkau lokasi geografis seluas mungkin, agar cepat diketahui oleh yang bersangkutan untuk mempercepat bertemunya permintaan

dan penawaran kerja. Untuk itu peran surat kabar, majalah, atau selebaran yang lain perlu di optimalkan fungsinya.

2. Pengangguran musiman, masalah yang timbul dalam dimensi musiman ini adalah saat- saat dimana sedang terjadi *off-season*, salah satu alternatif pemecahannya adalah mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang bersifat *off-Farm* atau *non-farm* di daerah pedesaan dimana irama musiman sudah suatu yang rutin. Bagi pengusaha lokal dapat menentukan bentuk dari kegiatan *off-farm* tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengikat penduduk desa yang bersangkutan sehingga kemajuan dan keberhasilan mereka dapat berdampak positif bagi pengembangan dasarnya.
3. Pengangguran Siklikal, untuk menanggulangi masalah pengangguran ini diperlukan kebijakan anti siklikal, biasanya berbentuk kebijakan moneter maupun fiskal. Kebijakan moneter dapat berupa memperluas uang yang beredar pada saat terjadi resesidan mengurangi jumlah uang beredar pada saat ekspansi berlebihan. Setrta dengan menurunkan tingkan bunga pinjaman yang dapat mempermudah bagi pengusaha dalam memperoleh modal untuk berusaha sehingga akan meningkatkan investasi yang akan berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja.
4. Pengangguran struktural dan teknologi
Masalah yang dihadapi berkenaan dengan masalah pengangguran jenis ini adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki pekerja.

Pemecahannya dengan cara pengarahan pada program pelatihan yang efektif.

5. Pengangguran karena kurangnya permintaan agregat, inti masalah dalam pengangguran jenis ini adalah lesunya berkenaan dengan kegiatan ekonomi, maka untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi ini diperlukan adanya investasi dengan skala besar untuk menghidupkan permintaan agregat.

2.2.3.4 Hubungan pengangguran dengan kemiskinan

Dalam teori pembangunan, pengangguran sangat dikaitkan dengan masalah ketenagakerjaan. Adanya pengangguran mengakibatkan berbagai masalah salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Seseorang yang mengalami pengangguran akan berakibat pada penurunan sumber pendapatan yang berakibat pada keterbatasan ekonomi di kalangan masyarakat. Adanya keterbatasan ekonomi akan menyebabkan masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan minimum harian, dengan kata lain akan kondisi ini akan menyebabkan kemiskinan.

Sukirno (2011) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini akan mengurangi tingkat kemakmuran.

2.2.4 Pertumbuhan Penduduk

Menurut BPS penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Di Indonesia khususnya pada negara yang sedang berkembang masalah pertumbuhan penduduk merupakan penghambat pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan penduduk akan menambah jumlah tenaga kerja sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan masalah rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat yang berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah penduduk yang terkendali terjadi apabila jumlah kelahiran seimbang dengan jumlah kematian. Adanya penekanan berkenaan dengan peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi lebih baik. Kenaikan jumlah penduduk setidaknya harus diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas penduduk hal ini dicerminkan dengan adanya peningkatan fungsi pendidikan, ini dimaksudkan untuk memperluas kesempatan kerja yang berguna untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Selain itu peningkatan fungsi kesehatan juga harus dimaksimalkan. Tentunya semua itu tidak lepas dari fungsi pembangunan. Adanya pemerataan pembangunan berkenaan dengan perbaikan fasilitas dan infrastruktur penunjang juga diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya peningkatan penduduk akan

menyebabkan kenaikan produktivitasnya juga, sehingga adanya peningkatan penduduk tidak akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat

Arsyad (2004) mengemukakan bahwa ada tiga ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan Indonesia yaitu, laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk yang kurang seimbang antar daerah, serta kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan.

2.2.4.1 Teori Kependudukan

1. Perangkap Penduduk Malthus

Pada tahun 1798 Reverend Thomas Malthus Mengemukakan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Teori ini berisikan bahwa kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur, yaitu menjadi dua-kali lipatnya setiap 30-40 tahun. sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung (Arsyad, 2004). Oleh sebab itu pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi yang mengakibatkan pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung mengalami penurunan menjadi sangat rendah selanjutnya akan menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak stabil atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten.

Malthus berkeyakinan bahwa satu-satunya cara untuk menghapuskan tingkat kehidupan yang rendah atau kemiskinan absolut dengan menganjurkan

masyarakat untuk menahan hawa nafsu dan memnatasi jumlah keturunannya. Namun karena teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa yang sederhana dan tidak berdasarkan pada uji verifikasi secara empiris , adanya pendapat Malthus terdapat banyak kritik antara lain :

- a. Teori ini tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi
- b. Teori ini berdasarkan hipotesa tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan perkapita tanpa dibuktikan dengan uji empiris
- c. Teori ini merupakan teori yang salah yaitu berpendapat bahwa pendapatan perkapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk. Suatu pendekatan yang lebih baik untuk masalah penduduk dan pembangunan adalah terpusat pada ekonomi mikro dari mulai proses pembuatan keputusan ukuran keluarga dari masing-masing individual dan tingkat kehidupan menjadi faktor penentu utama dari keputusan keluarga apakah akan mempunyai banyak atau sedikit anak.

2. Teori Transisi Kependudukan

Teori ini berusaha untuk menjelaskan 3 tahap dalam sejarah kependudukan modern antara lain :

- a. Tahap I yaitu sebelum terjadi modernisasi perekonomian negara mengalami pertumbuhan penduduk yang lambat sekali sebagai akibat dari tingginya tingkat kelahiran yang hampir sama dengan tingkat kematian.

- b. Tahap II ketika mulai terjadi modernisasi, perbaikan akan kesehatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi, dan kualitas makanan yang lebih baik menyebabkan penurunan tingkat kematian dan perlahan-lahan menaikkan tingkat harapan hidup dari bawah 40 tahun menjadi lebih dari 60 tahun. Penurunan tingkat kematian tidak secara langsung diikuti oleh penurunan angka kelahiran mengakibatkan perbedaan pertumbuhan antara tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah berakibat pada pertumbuhan penduduk menjadi sangat tinggi dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di tahap II ini menandai dimulainya transisi kependudukan yaitu transisi dari jumlah penduduk yang stabil dan lambat ke pertumbuhan yang cepat.
- c. Pada tahap III terjadi pada saat kekuatan dan pengaruh modernisasi dan pembangunan menyebabkan tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kematian sehingga pertumbuhan penduduk kecil sekali atau bahkan tidak tumbuh sama sekali.

2.2.4.2 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Kemiskinan

Dalam teori perangkap penduduk Malthus. Kemiskinan disebabkan karena adanya perbedaan proporsi antara pertumbuhan persediaan pangan dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten

Menurut Maier di kutip dari Kuncoro (1997), jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat.

2.2.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk belajar yang nantinya dapat berguna dalam meningkatkan potensi diri. Melalui pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin kebutuhan pendidikan menjadi sangatlah penting.

Menurut UU No.20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. dari definisi ini adanya pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan potensi dalam dirinya, yang nantinya potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencari pendapatan.

Semakin tinggi pendidikan menandakan semakin tinggi pula pengalaman serta penguasaan potensi diri, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mencari pekerjaan bagi masyarakat. Adanya pendidikan dapat berdampak pada tingginya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sehingga nantinya pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hariannya.

Indikator pendidikan yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial suatu daerah yang merata adalah dengan melihat angka melek huruf di suatu wilayah. Menurut BPS Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Menurut BPS Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya. Disamping itu dengan melihat Angka Melek Huruf (AMH) dapat juga membantu pemerintah untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan.

Angka Melek Huruf (AMH) berkisar antara 0- 100 (standar UNDP). Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif. Apabila tingkat melek huruf menunjukkan angka yang mendekati 0 (nol) maka sebaliknya, yaitu menunjukkan bahwa kualitas masyarakat di suatu wilayah mempunyai sistem pendidikan dasar yang sangat minim sehingga perlu kebijakan untuk menangani permasalahan berkenaan peningkatan pendidikan dasar.

2.2.5.1 Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

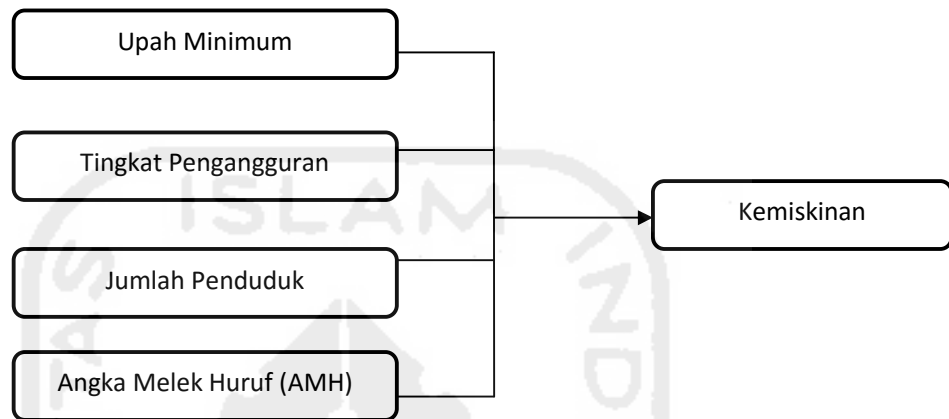
Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat adanya pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah akan berdampak pada kualitas modal manusia yang rendah pula. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, ini dikarenakan dalam penawaran tenaga kerja ada beberapa kriteria tertentu sebagai syarat untuk bekerja salah satunya adalah adanya tingkat pendidikan yang tinggi. Menurut Arsyad (2004) adanya pendidikan bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Ustama (2009) Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 HIPOTESIS

Merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu jawaban sementara yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015
2. Diduga variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

3. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015
4. Diduga variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015
5. Diduga variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015

